

## **Intervensi Pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerajaan Klungkung tahun 1841-1849**

### *The Dutch East Indies Government's Intervention Againsts the Klungkung Kingdom in 1841-1849*

**Tjokorda Istri Agung Rai Sintha Devi<sup>1</sup>, Dewa Made Alit<sup>2</sup>, I Nyoman Bayu Pramarta<sup>3</sup>**

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia,  
Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali (80239)

\*Pos-el: [coksintha.harapan@gmail.com](mailto:coksintha.harapan@gmail.com), [dewadaton@gmail.com](mailto:dewadaton@gmail.com), [pramarthabayu2@gmail.com](mailto:pramarthabayu2@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini membahas mengenai Intervensi Pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerajaan Klungkung yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan bentuk-bentuk intervensi Pemerintah Hindia Belanda serta bagaimana dampaknya terhadap Kerajaan Klungkung. Sebagai penelitian sejarah maka didahului dengan pengumpulan data dengan data sekunder yang berasal dari berbagai buku. Dari data tersebut kemudian dikritik, diinterpretasikan dan dihubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga menjadi sebuah keterkaitan. Berdasarkan keterkaitan tersebut kemudian disusun menjadi peristiwa sejarah. Teori terkait penelitian ini adalah teori kekuasaan, teori hegemoni dan teori konflik. Kedatangan pemerintah Hindia Belanda ke Kerajaan Klungkung dengan tujuan penguasaan Bali dalam memonopoli perdagangan Nusantara menjadi tujuan bangsa Belanda. Kerajaan Klungkung sebagai sesuhunan raja di Bali dan Lombok memiliki kekuasaan yang cukup penting sehingga menarik perhatian Belanda untuk melakukan intervensi ke kerajaan tersebut. Melalui perjanjian kontrak pemerintah Hindia Belanda melakukan intervensi diplomasi untuk menguasai Klungkung. Keadaan yang terus intensif membuat intervensi militer juga dilakukan untuk merebut pelabuhan Kerajaan sehingga berdampak terhadap keadaan ekonomi dan politik Kerajaan Klungkung.

**Kata Kunci:** Kerajaan Klungkung, Hindia Belanda, intervensi, kekuasaan

**Abstract.** This study discusses the Dutch East Indies Governments Intervention against the Klungkung Kingdom which aims to determine the background and forms of the Dutch East Indies Government intervention and how it affects to the Klungkung Kingdom. As a historical study it is preceded by data collection with secondary data derived from various books. The data are then criticized, interpreted and linked between one fact and another and becoming a connection between one fact and another. Based on this connection, it was later organized into historical events. The theories related to this research are power theory, hegemony theory and conflict theory. The arrival of the Dutch East government into the Klungkung Kingdom with the aim of controlling Bali to monopolize the Nusantara trade became Dutch goal. The Kingdom of Klungkung as a regent of king in Bali and Lombok had sufficient power to attract Dutch attention to intervene in the Kingdom. Through contractual agreements the Dutch East Indies Government intervened in diplomacy to control the kingdom. Continuing intensive circumstances led to

*militant intervention in the capture of the port of Klungkung Kingdom, which affected the economic and political situation of Klungkung.*

**Keywords:** *Kingdom of Klungkung, Dutch East Indies, intervention, power*

## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah pelabuhan yang bebas Singapura berkembang menjadi suatu entreport dimana kapal-kapal dagang dari segala daerah dan kebangsaan berkumpul untuk membawa barang dagangan mereka dan untuk mengambil barang-barang yang terakumulasi disana kemudian disalurkan ke manca negara lainnya. Singapura menjadi pusat perdagangan yang ramai di Asia yang pengaruhnya juga dapat dilihat di Bali dan Lombok. Di Bali tidak terdapat pelabuhan-pelabuhan yang mampu menampung kapal dagang besar, maka Bali didatangi oleh perahu-perahu Bugis, Mandar dan Malayu yang membawa dagangan dari Singapura dan kemudian mengambil barang dagangan berupa hasil bumi untuk diangkut ke Singapura dan diperdagangkan disana. Secara singkat dijelaskan bahwa adanya perdagangan langsung antara Singapura dan Bali pada waktu itu sekitar tahun 1830 (Agung, 1989: 80-81)

Pusat perdagangan pada waktu itu adalah pelabuhan Kuta terletak di Kerajaan Bali Badung dengan pelabuhan pantai timur dan pantai baratnya. Keadaan perdagangan langsung dan ramai antara Bali dan Lombok dengan Singapura tanpa melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa tentu menarik perhatian Pemerintah Hindia Belanda yang bertugas di Jawa, terutama mereka yang berkedudukan di dekat pulau Bali.

Melalui seorang residen yang bertugas di Surabaya menulis laporan kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia untuk meminta perhatian pemerintahnya mengenai keadaan yang sedang berlangsung di Bali, karena terdapat perdagangan langsung dan ramai yang terjadi antara Bali dan Singapura yang bisa saja membuat kerugian bagi perdagangan dan perekonomian Jawa dan jika terus dibiarkan keadaannya akan berkembang, sehingga mempunyai dampak politik yang dapat merugikan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia terutama di Pulau Jawa. Belanda mulai tertarik terhadap Bali karena ingin mendapatkan monopoli mutlak atas perdagangan di Nusantara dari pesaingnya di Bangsa Eropa lainnya terutama Bangsa Inggris.

Ketika Daendels diangkat menjadi Gubernur Jendral dengan tugas mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, Belanda mulai memperhatikan Pulau Bali. Belanda menganggap pulau Bali dapat digunakan sebagai benteng di timur untuk membendung ekspansi Inggris. Belanda beranggapan juga bahwa Inggris sedang berusaha untuk menduduki pulau Bali sebagai tangga untuk meloncat menguasai pulau Jawa dan daerah-daerah disebelah Timur pulau Bali.

Inggris memancing peperangan dengan kerajaan Buleleng dan Karangasem dengan mempertajam

sengketa perbudakan. Raffles mengumumkan agar menghentikan perbudakan orang dan perdagangan budak. Kedua kerajaan tersebut tidak menolak pengumuman yang disampaikan dan menyerang kedudukan Inggris pada awal bulan Februari 1814, namun serangan ini dapat digagalkan oleh Inggris dibawah tentara Spoy. Pada tanggal 14 Mei 1814 Inggris mengirimkan ekspedisi militer dipimpin oleh Jendral Nightingale menyerang Buleleng. Laskar Buleleng kalah dan raja terpaksa harus tunduk kepada kekuasaan asing.

Hubungan Bali dengan Belanda dalam bentuk ikatan kontrak (perjanjian), baru terjadi ketika masa pulau Bali sudah terpecah menjadi Sembilan atau delapan kerajaan. Timbulnya kerajaan-kerajaan kecil di Bali telah menyebabkan situasi politik dalam negeri menjadi lemah apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Situasi inilah yang memudahkan Belanda untuk menerapkan kekuasaannya melalui sistem kontrak. Belanda mengambil keuntungan dari peperangan antara Inggris dan Buleleng, bahwa perang tersebut sama saja dengan melawan solidaritas raja-raja Bali.

Dari agen-agen Belanda yang menetap di Pulau Bali, mereka mengetahui bahwa Klungkung diakui dan dihormati sebagai pimpinan federasi Bali walaupun antara kerajaan-kerajaan di di Bali sering terjadi peperangan saudara, namun pandangan dan anggapan terhadap kerajaan Klungkung tidak berubah terutama ketika menghadapi musuh dari luar. Terhadap

kerajaan Klungkung, Belanda bertindak waspada dan tetap mengakui Klungkung sebagai sesuhunan Bali dan Lombok.

Pada tahun 1817 Gubernemen Belanda mengirim duta ke Bali yang disertai dengan rombongan kecil. Rombongan tersebut dipimpin oleh H.A Van Den Broek dengan ajudannya bernama Roos, dan 20 orang militer dibawah pimpinan Letnan Lotse. Rombongan Duta ini dikirimkan dengan tujuan mempererat persahabatan antara Bali dengan Gubernemen, selain itu menghindari raja-raja Bali agar tidak melakukan hubungan kerjasama dengan bangsa Eropa lainnya terutama Inggris dan berusaha untuk mendapatkan izin mendirikan satu pangkalan dagang di Bali. Namun misi yang Van den Broek gagal, kegagalan ini disebabkan karena kecurigaan raja-raja Bali atas keinginannya tersebut. Dalam usaha Belanda mendekati kerajaan Klungkung setelah mengalahkan kerajaan Buleleng. (Raka Putra, 2015:249)

Selanjutnya kunjungan Belanda berada dibawah Huskus Koopman pada 27 April 1840 sampai awal tahun 1941. Pertimbangan-pertimbangan yang dilihat oleh Pemerintah Belanda adalah mendorong agar Pemerintah dapat meluaskan pengaruh-pengaruh politiknya ke seluruh Indonesia, termasuk Bali. Dalam pertemuannya dengan raja-raja di Bali pihak Belanda memanfaatkan permusuhan antar kerajaan di Bali-Lombok. Pada saat itu Dewa Agung sudah menaruh curiga terhadap pihak Belanda, pertemuannya dengan Belanda tidak berjalan baik dan menasehati utusan Belanda agar segera

meninggalkan Kerajaan Klungkung. Selain itu juga Dewa Agung Jambe menuliskan surat kepada semua raja di Bali agar menjauhkan diri dari Huskus Koopman dan menasihati perundingan dengan Komisaris Pemerintah itu.

Di pesisir Kerajaan Klungkung, mulai dari pabean Kusamba telah diperintahkan untuk membangun benteng-benteng dan pertahanan untuk membendung serangan musuh. Hal ini dilakukan karena kewaspadaan dan kecurigaan Dewa Agung Jambe terhadap bangsa Eropa sangat tinggi.

Babak kedua kunjungan Huskus Koopman ke Bali yaitu pada Mei 1841 sesuai dengan pemufakatannya dengan Gubernur Jendral Pieter Merkus dia berusaha segera mengadakan pendekatan dengan raja-raja di Bali. Namun bersamaan dengan kedatangannya pada saat itu pendaratan kapal Belanda "*Overijse*" di Tuban terjadilah suatu peristiwa yang mempunyai dampak yang menentukan dalam perkembangan politik selanjutnya di Bali dan Lombok. Dalam peristiwa ini laporan singkat yang diberikan oleh Kapten G. Blom selaku pemimpin kapal adalah kapal yang mereka punya benda-benda di dalamnya sudah dirampas oleh penduduk dan rusak hingga tenggelam, sehingga di dalam kapal sudah tidak tersisa apapun.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Huskus Koopman untuk melakukan penekanan terhadap raja-raja di Bali. Atas kejadian karamnya kapal Belanda tersebut dalam perundingannya Huskus Koopman menakuti raja dengan bahwa

besar kemungkinan Pemerintah Hindia Belanda akan melakukan tindakan balasan, yang dapat merugikan kerajaan.

Permainan diplomasi Huskus Koopman dibelakang layar berhasil dalam peristiwa ini, hasil perkembangannya adalah suatu penandatanganan kontrak antara Raja Kesiman dan raja Pemecutan di satu pihak atas nama Pemerintah Hindia Belanda yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 1841 dan disusul lagi dengan penandatanganan perjanjian lain sebagai tambahan pada 30 Juli 1841. Dalam penandatanganan dua perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa itu atas persetujuan dari Dewa Agung Klungkung dalam kedudukannya sebagai Susuhunan Bali dan Lombok (Arsip Nasional RI, 1964:147)

Belanda resmi melakukan kontak pertamanya dengan kerajaan Klungkung pada tanggal 6 Desember 1841 yaitu dengan melakukan sebuah kontrak perjanjian yang diusahakan oleh utusan Pemerintah Hindia Belanda yang mana dalam perjanjian tersebut juga sudah diselipkan pengaruh yang bersifat politis. Bagi kerajaan Klungkung hal ini adalah kontak pertama dengan Belanda dalam bentuk kontrak. Tetapi pasal-pasal yang termuat dalam kontrak ini tidak lagi menyebutkan persahabatan. Perjanjian ini justru memuat penyerahan kedaulatan sebagai pokok permasalahan, sehingga kontak pertama ini lebih banyak bersifat politik. Dewa Agung mau menandatangani perjanjian ini, karena Huskus Koopman berjanji bahwa Belanda akan memberi bantuan kepada Klungkung, Karangasem dan Buleleng

dalam satu peperangan melawan Lombok (Ibid, pp. 1-5).

Kedatangan Pemerintah Hindia Belanda ke Bali memiliki tujuan untuk menguasai Nusantara secara keseluruhan. Dengan kedatangannya ke Bali mereka mulai melakukan pendekatan terhadap penguasa-penguasa di Bali, termasuk Kerajaan Klungkung pada masa itu yang juga memiliki peran penting di Bali sebagai sesuhunan Kerajaan Bali dan Lombok yang dianggap oleh Belanda sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan dikemudian hari. Dengan melakukan pendekatan secara diplomasi Belanda terus melakukan intervensinya kepada Kerajaan Klungkung setelah pada kerajaan lainnya di Bali untuk mencapai tujuannya sebagai penguasa Nusantara dan menyaingi pesaing bangsa Eropa pada saat itu yaitu Bangsa Inggris.

Berdasarkan pernyataan diatas, dan belum dilakukannya penelitian sebelumnya terkait intervensi Pemerintah Hindia Belanda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Intervensi Pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerajaan Klungkung Tahun 1841-1849.

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh suatu kebenaran maka penelitian dan pengolahan data harus dilakukan dengan cara ilmiah, yaitu dengan mengadakan penyelidikan berdasarkan pada data-data yang disusun secara sistematis dan tertatur yang harus menggunakan teori-teori dan metode-metode yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan

metode maka penelitian dapat dilakukan dengan mudah. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Methodos*" yang artinya cara atau jalan. Jadi "metode adalah sebuah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran pemecahan permasalahan" (Subagyo, 2006 : 53).

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian sejarah yang langkah-langkahnya berupa heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis (library research) serta menggunakan data wawancara. Buku-buku yang digunakan merupakan buku-buku yang menyinggung mengenai kerajaan klungkung dengan pemerintah hindia belanda. Seperti Bali Abad XIX oleh AA Gde Agung, Sejarah Klungkung dari Smarapura hingga Puputan, Babad Dalem Warih Ida Sri Aji Kresna Kepakistan oleh Tjokorda Raka Putra maupun arsip-arsip Nasional Indonesia. Data yang sudah terkumpul dikritik dengan kritik ekstern untuk menentukan orisinilitas data dan juga kritik intern untuk mengetahui kredibilitas pembuat sumber. Fakta kemudian diinterpretasikan, dihubungkan dengan antara fakta satu dengan yang lainnya sehingga menerukan rangkaian yang utun sebuah peristiwa sejarah. Keterkaitan fakta ini kemudian dituangkan dalam sebuah cerita sejarah yang dilandasi oleh prinsip

serialisasi, kronomogi daj kausalitas (Utrecht, 1962).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kedatangan Hindia Belanda ke Bali selain bertujuan untuk memperluas daerah kekuasaannya tetapi juga menjadikan masyarakat bali sebagai tenaga kerja. Untuk menanamkan kekuasaannya di Bali khususnya Kerajaan Gianyar, Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk ikut mencampuri urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Bali khususnya pada Kerajaan Klungkung.

Hubungan Klungkung dengan Belanda sudah terjadi sejak abad XVII yang dimulai dengan kontak dagang. Hubungan Belanda dengan Bali awalnya hanya dalam perdagangan budak dan mencari calon-calon prajurit. Namun setelah adanya serangan dari Inggris dalam dan Belanda yang berusaha mempertahankan Pulau Jawa maka Belanda menyadair bahwa Bali bisa dijadikan benteng di Timur untuk membendung ekspansi Inggris.

### **Awal Berdirinya Kerajaan Klungkung**

Setelah Kiayi Agung Maruti melakukan perebutan kekuasaan di Gelgel pada tahun 1651 M dan menobatkan dirinya sebagai penguasa Bali maka anglurah di berbagai daerah di Bali tidak mengakui dan menolak pemerintah Maruti di Gelgel. Para anglurah menyatakan berdiri sendiri dan menyatakan dirinya sebagaia raja dari kerajaan baru yang tidak lagi dibawah

kekuasaan Maruti. Setelah Keraton Swecapura di gelgel dapat direbut oleh pasukan gabungan laskar Sidemen, Buleleng dan Badung maka berdiri lah sebuah kerajaan baru yaitu Kerajaan Klungkung (Raka Putra, 2015: 198)

Atas nasehat dan prakarsa Gusti Sidemen, keraton atau pusat pemerintahan dari Kerajaan dipindahkan ke Klungkung. Nama keraton raja yang baru ini disebut Smarajaya. Keraton Smarajaya dibuat dengan mengikuti pola dari keraton Majapahit. Dapat dipastikan bahwa keraton Gelgel telah mengalami kerusakan fisik baik karena peristiwa pemberontakan maupun karena perang untuk mengakhiri kekuasaan Gusti Agung Maruti. Ida Dewa Agung Jambe yang didudukkan sebagai Kerajaan Klungkung juga menyatakan bahwa tidak ingin berkeraton di Gelgel, karena Gelgel dianggap telah leteh, tidak layak sebagai pusat kerajaan serta tidak memiliki karisma sebagai pusat pemerintahan karena telah terjadi sebanyak tiga kali pemberontakan besar. Keraton Gelgel menjadi sepi karena para pejabat kerajaan telah meninggalkan tempat tersebut.

### **Struktur Pemerintahan Kerajaan Klungkung**

Struktur pemerintahan yang bersifat tradisional maupun modern diharapkan dapat memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut akan dilihat melalui dua pendekatan yaitu pendekatan menurut pandangan India Kuno dan pendekatan melalui pandangan modern. Selain itu perlu diingat kembali bahwa Kerajaan Klungkung pada saat itu, yaitu pada

zaman kuno belum merupakan sebuah negara, dalam hal ini sebuah kerajaan yang berdiri sendiri tetapi merupakan sebuah bagian dari integrasi dari Kerajaan Bali Kuno. Oleh karena itu membahas mengenai syarat-syarat berdirinya sebuah negara yang akan dibahas cenderung berhubungan dengan keseluruhan wilayah yang ada di Bali. Klungkung dipandang sebagai bagian integral Pulau Bali yang diperintah secara sentralistik dari pusat Kerajaan Bali Kuno pada saat itu.

Untuk dapat melaksanakan sistem pemerintahan yang baik dan teratur, wilayah kerajaan di bagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yaitu kemandirian desa dan banjar. Struktur birokrasi dalam kerajaan juga disesuaikan dengan pembagian setiap wilayah. Maka ada pemerintahan tingkat pusat yang berpusat di keraton Smarapura yang wilayah kekuasaannya meliputi wilayah kerajaan Klungkung. Dalam struktur birokrasi Kerajaan Klungkung, susunan hirarki kerajaan adalah sebagai berikut: (1) raja, (2) punggawa atau manca, (3) Bendesa dan (4) Klian (Wirawan, 2018: 14).

Sistem pemerintahan Kerajaan Klungkung berdasarkan atas konsep wilayah dengan pusatnya berada di Puri Agung Klungkung Smarajaya dan berkembang luas ke luar, ke daerah kemandirian hingga sampai ke desa. Raja sebagai titik pusat kerajaan yang dipegang oleh seseorang yang dipilih secara turun temurun, kekuasaan secara *monarki absolute*, semua keputusan adalah ditangan seorang raja. Selama periode Kerajaan Klungkung yang

berdaulat dari 1687 M sampai dengan 1908 M, tahta pemerintahan secara menurun dipegang oleh sepuluh raja sebagai sesuhunan yang bergelar Ida Dewa Agung, adalah keturunan Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan.

### **Latar belakang Intervensi Pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerajaan Klungkung**

Perkenalan Belanda dengan Bali khususnya Klungkung terjadi pada zaman Gelgel pada masa pemerintahan Dalem Bekung yang dibantu oleh adiknya Dalem Segening, ekspedisi Belanda pertama kali dipimpin oleh Cornelis De Houtman dan mendarat di Pantai Kuta pada tahun 1597 (Depdikbud, 1978: 120). Sistem ikatan kontrak antara Belanda dengan Klungkung baru terjadi setelah Bali terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil sehingga situasi menyebabkan Bali lemah dan memudahkan Belanda untuk menerapkan sistem kontrak. Melalui sebuah perjanjian yang diusahakan oleh utusan Belanda yaitu Huskus Koopman (Sidemen, 1983: 67).

Dari agen-agen Belanda yang menetap di Pulau Bali, mereka mengetahui bahwa Klungkung diakui dan dihormati sebagai pimpinan federasi Bali walaupun antara kerajaan-kerajaan di di Bali sering terjadi peperangan saudara, namun pandangan dan anggapan terhadap kerajaan Klungkung tidak berubah terutama ketika menghadapi musuh dari luar. Terhadap kerajaan Klungkung, Belanda bertindak waspada dan tetap mengakui Klungkung sebagai sesuhunan Bali dan Lombok

(Sidemen, 1983: 67 ). Adapun faktor nya yaitu

### ***Faktor Ekonomi***

Ekonomi Bali pada awal abad ke-19 masih sangat bergantung dengan perdagangan budak keluar Bali. Sekitar 2000 budak setiap tahun diperjualbelikan oleh bangsawan-bangsawan Bali. Sebaliknya mereka mendatangkan komoditas seperti koin-koin tembaga, senjata, dan khususnya candu. Candu dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Bali pada saat itu. Dua puluh tahun berikutnya, Bali menjadi pengekspor komoditas pertanian khususnya beras, kopi dan nila (Ilham, 2019: 218).

Kerajaan Klungkung memiliki basis ekonomi pertanian. Subak sebagai pengguna air tradisional yang memegang peranan sangat penting. Sawah-sawah di Kerajaan Klungkung secara teratur mendapatkan air dari subak-subak yang tersebar.

Untuk melakukan ekspor barang-barang ke luar kerajaan dan melakukan kontak kepada para pedagang luar, yaitu pedagang-pedagang Cina sebelum kedatangan Belanda. Pedagang-pedagang tersebut mendatangkan dagangan mereka dari luar yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali seperti: candu, gambir, tekstil, kepeng yang merupakan satu-satunya alat pembayaran di Bali, barang-barang besi, mesiu dan senjata api. Barang-barang itu mereka tukar dengan hasil bumi seperti beras, minyak, kelapa, tembakau, kulit sapi, kapas, telur asin dendeng dan kain tenun Bali. Candu merupakan komiditi

yang paling banyak dijual di Bali pada masa itu, karena menghisap candu merupakan sebuah kebiasaan umum bagi masyarakat Bali. Pada masa itu juga Bali merupakan pengekspor beras dan sapi yang cukup besar (Agung, 1989: 79-80).

Fungsi kebandaraan dan sebagai pusat pemerintahan menyebabkan Kusamba dijadikan sasaran intervensi oleh pemerintah Hindia Belanda. Kusamba sebagai pelabuhan kerajaan yang strategis dalam bidang politik dan dijadikan perantara oleh Belanda sebagai basis terhadap niatnya untuk menaklukkan Kerajaan Klungkung. Jika Belanda berhasil menguasai Kusamba maka salah satu pengaruh besar politik dan ekonomi hilang dari Kerajaan Klungkung (Arthanegara, 2019:4). Keadaan perdagangan langsung dan ramai antara Bali dan Lombok dengan Singapura tanpa melalui pelabuhan-pelabuhan di pulau Jawa tentu saja menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda, tak terkecuali pada kerajaan Klungkung di Pelabuhan Kusamba. Pemberlakuan hak tawan karang pada penguasa-penguasa Bali juga menghalangi tujuan Belanda untuk menguasai mutlak perdagangan Nusantara dan mencegah berkembangnya perdagangan langsung Bali dengan bangsa asing lainnya.

### ***Faktor Politik***

Dalam hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Bali, raja Dewa Agung di Klungkung berusaha menyatukan Pulau Bali dengan cara diplomasi. Dengan mengadakan pasebaya atau kratabaya dalam wujud

paswara-paswara. Kerajaan Klungkung berusaha untuk mengembalikan legitimasinya. Pada pasabaya antara kerajaan Gianyar, Badung dan Tabanan yang disahkan pada Rabu Kliwon Pahang tahun 1751 Saka atau tahun 1829, status raja Klungkung sebagai seorang pemimpin tertinggi diakui oleh ketiga kerajaan. Mereka menyatakan takluk dibawah raja Klunhkung. Hal ini dinyatakan sebagai berikut:

*“... jan wenten pakajunan I Dewa Agung ngarjanin karahajuan negara tigang negara kocaping arep, ika maka awanan subakti mamekul palinggih Ida I Dewa Agung sareng tigang negara Gianyar, Badung, Tabanan”*

Kemudian selanjutnya Kerajaan Klungkung melakukan paswara antara Kerajaan Gianyar, Bangli, Payangan, Badung dan Mengwi yang disahkan pada hari Rabu Pon tahun 1759 Saka (1837 M), raja Klungkung mulai mendapatkan legitimasinya kembali. Dengan titel Ida Cokorda Ida I Dewa Made Agung menepatkan kembali raja Klungkung pada status tahta tertinggi sebagai penguasa selama hayat dikandung badan (sasungking urip).

Selain bertujuan mendapatkan kembali legitimasinya sebagai penguasa tertinggi, kerajaan Klungkung juga ingin melakuka penyatuan Bali guna bersama-sama menghadapi ancaman dari Belanda. Belanda yang telah mengetahui Kerajaan Klungkung diakui sebagai sesuhunan Bali dan Lombok mengakui kekuasaan raja Klungkung. Sekitar tahun 1849 sebelum Perang Kusamba meletus, pemerintah Hindia Belanda

telah lebih dulu melakukan penyerangan terhadap kerajaan Bali lainnya yaitu Kerajaan Buleleng dan Karangasem. Belanda kemudian mengarahkan sasarannya kepada Kerajaan Klungkung untuk segera dapat ditaklukkan. Kerajaan Klungkung menjadi target berikutnya karena sangat aktif membantu Kerajaan Buleleng dalam perang sebelumnya. Dengan posisi Klungkung sebagai sesuhunan Bali dan Lombok, jika Kerajaan Klungkung dapat ditaklukkan maka ini dianggap sebagai inti dari perlawanan rakyat Bali kepada Pemerintah Hindia Belamda. (Raka Putra, 2015: 257). Kemudian pembuktian dari kekuasaan Raja Klungkung sebagai sesuhunan terbukti pada pertengahan pertama abad XIX, pada setiap kontrak yang dilakukan antara beberapa kerajaan Bali dengan Belanda, mereka tidak dapat mengabaikan peranan Klungkung. Raja yang akan melakukan kontrak harus sepengetahuan raja Klungkung, baik meminta pertimbangan ataupun persetujuan (Sidemen, 1983:56-57). Adapun empat factor yang mendorong Gubernemen Belanda meneruskan kebijaksanaan politiknya terhadap pulau Bali yaitu:

1. Ancaman dari Raffles yang berkedudukan di Bengkulu, yang setiap saat bisa saja datang dan menanamkan perannya di Bali.
2. Gubernemen memerlukan serdadu yang terdiri atas orang-orang Bali. Kebutuhan ini sangat mendesak bagi pihak Belanda setelah meletusnya perang Diponogoro.
3. Belanda berkeinginan agar hak tawan karang dihapuskan, karena ini

tentu saja menghalangi kelancaran perniagaannya.

4. Belanda cenderung ingin menguasai monopoli perdagangan candu di Bali.

Kedatangan Pemerintah Hindia Belanda ke Kerajaan Klungkung tentu saja ingin memenuhi tujuannya dalam menguasai Nusantara secara mutlak juga dalam bidang Politik. Menguasai Klungkung secara politik atau dengan melakukan perjanjian maka akan mempermudah Pemerintah Hindia Belanda untuk dapat melakukan intervensinya di dalam kerajaan. Terlebih pada kekuasaan Kerajaan Klungkung sebagai sesuhunan Bali Lombok dimanfaatkan oleh Belanda untuk melakukan perjanjian kontrak dengan kerajaan-kerajaan Bali lainnya.

#### **Bentuk Intervensi yang Dilakukan Oleh Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Kerajaan Klungkung**

Belanda mulai tertarik dengan Bali karena ingin mendapatkan monopoli mutlak atas perdagangan di Nusantara, dari pesaing Bangsa Eropa lainnya. Keadaan politik Indonesia termasuk Bali tidak lepas dari pencaturan politik yang berada di Eropa. Pada tahun 1789 terjadi Revolusi Perancis yang berdampak terdapat terjadinya perubahan-perubahan kekuasaan di Eropa. Kerajaan Perancis menyerang dan menguasai Kerajaan Belanda, termasuk juga menguasai daerah kekuasaan Belanda di Indoensia pada tahun 1789, Belanda dijadikan republic yang bernama *Bataafse Republik*. Pada tahun 1799 *Bataafse Republik* mengambil seluruh

utang dan daerah kekuasaan yang dimiliki oleh VOC kemudian VOC diburbarkan. Dari tahun 1806 hingga tahun 1816 Belanda menjadi bagian dari Perancis, dengan mengangkat Lodewijk Napoleon adik Kaisar Napoleon menjadi Raja Belanda dan mengangkat Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Jawa (Raka Putra, 2015: 247).

#### ***Perjanjian Kontrak***

Perluasan kontrol pemerintah Hindia Belanda di Batavia yang semakin intensif terhadap Kerajaan Klungkung. Hubungan yang awalnya merupakan sebuah hubungan persahabatan berkembang dan meningkat melalui apa yang disebut dan disepakati menjadi sebuah perjanjian, bersamaan dengan kepentingan politik dan ekonomi yang semakin luas. Pemerintah Hindia Belanda secara bulat ingin merebut pengaruh di Kerajaan Klungkung. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari situasi Internasional maupun tingkah laku politik dan ekonomi kerajaan Klungkung (Wirawan, 2018: 34)

Pada tahun 1817 Gubernur Belanda mengirimkan duta ke Bali yang disertai oleh rombongan kecil. Rombongan ini bertujuan untuk melakukan silaturahmi persahabatan antara Bali dan Gubernur, tentu saja agar menghindarkan raja-raja Bali tidak mengadakan hubungan dengan bangsa Eropa lainnya terutama Inggris dan berusaha mendapatkan izin mendirikan satu pangkalan di Bali (Sidemen, 1983:67). Sebelumnya Belanda telah

berhasil membangun sebuah loji akan tetapi tak bertahan lama loji tersebut dibongkar kembali. Sebenarnya kedatangan Belanda ke Bali sangat menimbulkan kewaspadaan penguasa-penguasa di Bali, semua menaruh rasa curiga kepada bangsa Eropa yang datang ke Pulau Bali dan melakukan siaga terhadap kedatangan Belanda.

Pada tanggal 26 Juli 1841 Huskus Koopman berhasil melakukan perjanjian kontrak terhadap Kerajaan Badung. Perjanjian tersebut baru ditandatangani pada 30 Juli 1841. Kemudian disusul dengan keberhasilan Huskus yang kedua pada tanggal 6 Desember 1841. Perjanjian kontrak ini ditandatangani di Istana Klungkung pada hari Senin 6 Desember 1841. Sebagai wakil Klungkung yang telah ikut melakukan perjanjian kontrak antara lain: Ratu Dewa Agung Putra (raja), Ratu Dewa Agung Gede, Anak Agung Ketut Rai, Padanda Wayahan Pidada dan Ida Wayahan Sidemen. Dari pihak Belanda diwakilkan oleh H.J Huskus Koopman (Sidemen, 1983: 69).

Dengan disahkannya perjanjian kontrak antara Kerajaan Klungkung dan Pemerintah Hindia Belanda, ini merupakan kontak Klungkung dengan Belanda melalui sebuah kontrak. Pasal-pasal yang dimuat dalam kontrak ini tidak sepenuhnya menyebutkan persahabatan seperti yang dibuat oleh Belanda dengan Badung. Pada pasal satu dan dua dari perjanjian tertanggal 6 Desember 1841, mengharuskan raja

Klungkung mengakui kedaulatan Gubernur Hindia Belanda di atas negeri Klungkung. Pengakuan ini harus dibuktikan dengan mengibarkan bendera Belanda di semua pelabuhan di Kerajaan Klungkung. Selain itu dalam kontrak juga disebutkan bahwa Klungkung tidak diperbolehkan berhubungan dengan bangsa kulit putih lainnya. Jika Belanda sedang mengadakan perang Kerajaan Klungkung harus membantu Belanda. Raja Klungkung wajib mengakui pula semua kontrak yang telah dibuat dengan raja-raja Buleleng, Karangasem dan Badung (Arsip Nasional RI, Sidemen, 1983: 71).

Pada tahun 1843 Belanda kembali memaksakan keinginannya untuk melakukan perjanjian kontrak kembali dengan raja-raja di Bali, kali ini mengenai hak tawan karang yang diberlakukan di Pulau Bali. Dikarenakan Pulau Bali tidak memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral maka salah satu cara untuk menambah potensi ekonomi kerajaan adalah dengan diberlakukannya hak tawan karang. Hak eksklusif ini hanya berlaku di Pulau Bali dan tidak terdapat di pulau lainnya kecuali Lombok yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Karangasem. Hak ini diberlakukan di semua kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Bali khususnya yang berada di pinggir pulau atau pantai. Hal ini kemudian menjadi permasalahan bagi Pemerintah Hindia Belanda. Kapal-kapal bangsa Eropa yang karam atau tenggelam di wilayah pinggir pantai-

pantai di Pulau Bali tidak dapat lagi mengklaim barang-barang yang ada di dalam kapal tersebut karena sudah menjadi hak dari raja-raja Bali yang berkuasa. Bagi Pemerintah Hindia Belanda hal ini sangat merugikan, maka dengan alasan ini Belanda ingin menghapuskan hak tawan karang atau minimal mendapatkan kembali barang-barang yang sudah diambil (Ilham, 2019: 219).

Pada tanggal 24 Mei 1843 Belanda berhasil mengesahkan sebuah perjanjian dengan raja Klungkung, bertempat di Kerajaan Klungkung. Sebagian pasal-pasal nya membahas mengenai penghapusan hak tawan karang yang berhubungan erat dengan kelancaran pelayaran dan perdagangan Belanda di Bali. Sebagian lagi merupakan penegasan kedaulatan politik Belanda atas Kerajaan Klungkung. Pasal empat, lima dan enam perjanjian tanggal 24 Mei 1843, dengan jelas menyatakan bahwa kehendak Belanda ingin menempatkan Klungkung dibawah kedaulatan kedudukan politik Belanda. Dalam pasal-pasal ini Belanda menginginkan raja Klungkung harus mengirimkan utusan ke Batavia sebagai tanda hormat kepada Belanda setiap tiga tahun, sedangkan Belanda mengirimkan utusan ke Klungkung kalau dipandang perlu. Belanda tidak akan mencampuri urusan pemerintah dalam negeri Kerajaan Klungkung (Sidemen, 1983: 71).

### **Mengambil Alih Pelabuhan Kusamba**

Perluasan kontrol pemerintah Hindia Belanda yang semakin intensif terhadap Kerajaan Klungkung. Pemerintah Hindia Belanda memaksa untuk merebut pengaruh di Kerajaan Klungkung karena sudah terdesak oleh situasi Internasional maupun perkembangan dari Kerajaan Klungkung. Pedagang Inggris, saingan kuat Belanda di Eropa mulai memasuki perairan Nusantara secara lebih intensif baik sebagai pribadi maupun atas nama pemerintah. Pemerintah Inggris berusaha keras berhubungan dengan raja-raja di Bali dan juga menjalankan misinya untuk berpijak pada daerah yang belum dikuasai Pemerintah Belanda. Atas alasan ini lah Pemerintah Hindia Belanda mulai merasakan ancaman dari saingannya dan mulai memperkuat usahanya dalam mengambil pengaruh pada raja-raja di Bali termasuk pada Kerajaan Klungkung.

Keinginan untuk merebut pengaruh tampak semakin jelas dan mendesak setelah Inggris menyerang raja-raja di Bali pada tahun 1814 sedangkan pedagang Inggris telah mendapatkan kedudukan yang kuat di Selat Lombok., Inggris dapat berhubungan dengan Singapura, Nusantara bagian timur dan Australia. Masalah kedudukan pedagang Inggris yang semakin kuat berkembang menjadi perdebatan, isu sentralnya adalah Bali akan dijadikan sebagai Singapura kedua oleh Inggris. Bersamaan dengan itu pemerintah

Hindia Belanda memikirkan strategi bagaimana Ida Dewa Agung Klungkung harus memahami dan mengakui kekuasaan Gubernemen Belanda di Bali dan Lombok tanpa gejolak. Belanda menganggap Inggris sebagai ancaman yang memerlukan tindakan nyata dan segera.

Pada tahun 1838 Belanda pernah melakukan pendekatannya terhadap Kerajaan Klungkung meminta untuk mendirikan kantor dagang di Kusamba pada tahun 1838, namun hal tersebut ditolak oleh Ida Dewa Agung Klungkung. Penolakan ini tentu saja didasari pertimbangan politik dan ekonomi. "Pelabuhan Kusamba merupakan salah satu pengaruh besar bagi perekonomian Kerajaan Klungkung, hal ini disebabkan karena pendapatan pelabuhan berupa pajak dalam kegiatan perniagaan masyarakat Klungkung dengan menjual dan membeli barang melalui pelabuhan Kusamba, mengingat Kusamba merupakan salah satu wilayah Kerajaan Klungkung yang terletak di tepi paling timur dan merupakan daerah tapal batas antara Kerajaan Klungkung dan Karangasem. Kusamba merupakan bandar utama kerajaan Klungkung yang berjarak lebih kurang 8km dari ibu kota Kerajaan Klungkung. Desa Kusamba adalah salah satu desa penting dan bersejarah di Klungkung, desa yang berada di pesisir pantai ini pernah menjadi Ibu Kota kedua kerajaan Klungkung pada masa pemerintahan Ida I Dewa Agung Putra Kusamba. Dewa

Agung membangun sebuah istana di dekat pantai yang diberi nama Kusanegara (Arthanegara, 2019:1-2).

### **Dampak Intervensi yang Dilakukan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Kerajaan Klungkung**

Sebelum kedatangan Hindia Belanda ke Bali, sistem feodal. Struktur pemerintahan tradisional sudah sejak lama melandasi sistem pemerintahan di Bali. Hal ini nampak jelas disalam sistem birokrasi tradisional atas daerah kerajaan yang tetap berlangsung sampai akhir abad XIX yaitu saat timbulnya kontak langsung antara raja-raja di Bali dengan Pemerintah Hindia Belanda (Sejarah Daerah Bali, 1977: 6). Kehidupan masyarakat Bali pada abad ke XIX masih bersifat tradisional. Masyarakat Bali dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu masyarakat agraris dan masyarakat pantai.

Kedatangan Belanda ke Bali guna menguasai mutlak perdagangan Nusantara tentu saja merubah sistem tatanan dari raja-raja di Bali tak terkecuali Klungkung. Kedatangan Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-19 mulai ditandai dengan upaya-upaya sistematis pemerintah Hindia Belanda dalam menerapkan kebijakan dengan tujuan melakukan intervensi terhadap persoalan luar negeri dan dalam negeri kerajaan-kerajaan di Bali (Sumakto, hal. 6). Dengan penyerangan di daerah Kusamba yang dilakukan oleh

Pemerintah Hindia Belanda, sedikit banyaknya merubah keleluasaan Kerajaan Klungkung dalam kerajaannya sendiri. Dampak intervensi yang ditimbulkan Pemerintah Hindia Belanda akan berpengaruh kepada beberapa aspek kehidupan pada masyarakat Klungkung yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan.

### ***Dampak Politik di Kerajaan Klungkung***

Setelah masuknya Belanda dan melakukan kontak langsung terhadap kerajaan Klungkung, banyak perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan Pemerintah Hindia Belanda dalam usahanya menguasai Bali. Dengan melakukan intervensi militernya di Kerajaan Buleleng dan Karangsem pihak Hindia Belanda segera mengadakan serangan terakhirnya ke Kerajaan Klungkung karena telah dianggap membangkang terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Dari sudut pandang politik, Klungkung telah kehilangan sebagian wilayah kerajaannya. Meskipun Belanda kemudian meninggalkan Kusamba, tetapi penempatan sejumlah serdadu Belanda di Kusamba bagaikan duri dalam daging. Akibat dari serangan Kusamba, pada tanggal 13 Juli 1849 Kerajaan Klungkung harus menandatangani perjanjian baru dengan Gubernur Belanda, yang menyatakan bahwa raja Klungkung menyerahkan kerajaannya kepada Hindia Belanda. Dalam perjanjian tersebut disebutkan antara lain:

1. Pengakuan pemerintah Hindia Belanda bahwa Dewa Agung

Putra tetap dianggap sebagai sesuhunan Bali Lombok.

2. Dewa Agung Putra mengaku bahwa kerajaan-kerajaannya adalah bagian dari Hindia Nederland dan sama sekali tidak akan menyerahkannya kepada bangsa kulit putih lainnya. Kalau ada bangsa kulit putih yang ingin tinggal di wilayah kerajaan Klungkung maka harus mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda.
3. Dalam dunia pelayaran, pemerintah Hindia Belanda dapat memberlakukan perahu-perahu dagang kerajaan Klungkung sama dengan kerajaan lain yang bersahabat dengan Pemerintah Hindia Nederland.
4. Raja Klungkung berjanji akan menghapuskan peraturan hak tawan karang untuk selamanya dan akan menggantinya dengan peraturan yang membantu dan menyelamatkan setiap kecelakaan kapal yang terjadi di pantai wilayah Kerajaan Klungkung.
5. Raja Klungkung berjanji akan menyerahkan semua pelarian penjahat yang menyembunyikan diri ke Kerajaan Klungkung, kepada pemerintah Hindia Belanda.
6. Selama raja Klungkung mentaati segala perjanjian yang telah disepakati bersama maka pemerintah Hindia Belanda tidak akan ikut campur urusan

dalam negeri kerajaan Klungkung.

Jika dilihat dari isi perjanjian-perjanjian yang baru ditandatangani oleh raja-raja di Bali maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat banyak perbedaan dengan perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Komisararis Huskus Koopman dengan raja-raja Bali dalam kurun waktu 1841-1843. Dalam perjanjian tersebut pokok terpenting adalah pengakuan raja-raja Bali bahwa kerajaan mereka adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pernyataan mereka untuk mengakui kedaulatan dan kekuasaan tertinggi Pemerintah Hindia Belanda. Hal yang demikian mengakibatkan bahwa raja-raja di Bali dan Lomnok tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian dengan penguasa asing lain selain Pemerintah Hindia Belanda dan mengizinkan berkibarnya bendera Belanda baik di daratan maupun di laut, di atas kapal atau perahu mereka. Pokok penting lainnya adalah kesanggupan raja-raja di Bali untuk melepaskan tanpa syarat hak tawan karang.

### ***Dampak Dalam Bidang Ekonomi***

Perkembangan kebijakan pengaturan penguasaan tanah di Bali setelah kedatangan pemerintah Hindia Belanda dimulai dengan upaya Hindia Belanda melakukan intervensi kepada urusan dalam negeri maupun luar negeri kerajaan. Konsep traktat politik yang disetujui oleh raja pada tahun 1841 dan 1843. Dengan perjanjian tersebut pemerintah Hindia Belanda mulai gencar melakukan intervensi dan membuat kekuasaannya lebih kuat di wilayah Bali. Pemerintah Hindia Belanda melakukan

haluan politik *beperkte onhouding* yang mana politik baru ini mendapatkan realisasi dalam perjanjian tahun 1841 dan 1843. Dalam perjanjian tersebut berisi upaya Belanda mendapatkan satu wilayah berpengaruh yang dapat dipertahankan terhadap kekuatan barat. Pembuktian secara terys-terus dilakukan dengan masukd memagari kekuasaan-kekuasaan bangsa barat yang lain agar tidak memasuki Bali. Dengan sistem traktat politik yang diterapkan Belanda maka pemberlakuan tersebut berlaku diseluruh wilayah kerajaan Bali.

Setelah menyerahnya Kerajaan Klungkung dan mau menandatangani perjanjian kontrak dengan Pemerintah Hindia Belanda tentu saja ada perubahan dalam tatanan di bidang Ekonomi yang terjadi di Kerajaan Klungkung. Melalui sistem kontrak, Belanda merebut semua hak raja Klungkung dalam hal bidang ekonomi. Berawal dari perjanjian penghapusan hak tawan karang yang kembali ditegaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, itu berarti kapal Belanda bebas keluar masuk jalur perniagaan Kerajaan Klungkung tanpa adanya perampasan barang-barang di dalamnya dan Belanda mempunyai hak atas perniagaan di Bandar Kusamba. Jatuhnya Kusamba ke tangan Belanda telah mengurangi pemasukan ekonomi Kerajaan. Terutama pada perdagangan candu, yang mana ini merupakan salah satu pemasukan terbesar untuk penguasa di Bali dan juga salah satu tujuan Pemerintah Hindia Belanda adalah menguasai perdagangan candu di Bali yang dianggap menguntungkan Belanda. Posisi Kusamba yang strategis dalam hal ekspor impor sangat menguntungkan

Belanda dalam hal pelayaran dan perniagaan, hal ini juga salah satu tujuan dari pemerintah Hindia Belanda karena ingin menguasai perdagangan Nusantara. Dengan jatuhnya Kusamba merupakan pukulan berat bagi kerajaan Klungkung, karena Kusamba merupakan pintu ekspor impor yang sangat ramai dan berpotensi untuk berkembang. Kerajaan Klungkung tidak dapat bertindak leluasa dan bebas mengelola bandar Kusamba. Pemasukan be cukai lewat bandar Kusamba tidak lagi sepenuhnya menjadi milik kerajaan, karena Belanda sudah ikut campur tangan dalam pengelolaannya (Sidemen, 1983: 10).

#### **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian tentang Intervensi Pemerintah Hindia Belanda terhadap Kerajaan Klungkung yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kedatangan Hindia Belanda ke Bali memiliki tujuan untuk melakukan penguasaan dalam hal perdagangan dan menguasai secara keseluruhan Nusantara. Kedatangan Belanda untuk mengintervensi Kerajaan Klungkung merupakan salah satu dari tindakan yang dilakukan Hindia Belanda.

Kerajaan Klungkung merupakan sehubungan Kerajaan Bali dan Lombok yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh yang cukup besar atas keputusan-keputusan raja-raja di Bali. Hal ini menarik perhatian Belanda karena tujuannya untuk menguasai Bali dan mencegah persaingan dari Inggris untuk datang menguasai Bali juga. Dalam pendekatannya Belanda

melakukan intervensi diplomasi dan melakukan perjanjian-perjanjian kontrak yang tidak disadari oleh raja Klungkung merupakan sesuatu yang merugikan kerajan karena tipu muslihat Belanda. Selain itu penghapusan hak tawan karang juga merupakan tujuan dai Belanda agar mereka bisa bebas memasuki lautan wilayah Bali tanpa adanya penjarahan dari warga.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya intervensi ini juga cukup besar dalam bidang politik dan ekonomi sehingga Kerajaan Klungkung tunduk atas kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

#### **SARAN**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan saran-saran sebagai berikut. Kedatangan Hindia Belanda dapat memberikan pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi agar tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat merugikan kita sendiri. Hal ini juga seharusnya dapat mempererat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme. Kedatangan Hindia Belanda memberi banyak pelajaran yang kemudian dapat diterapkan di dalam kehidupan di masa yang akan datang seperti meningkatkan rasa nasionalisme dalam bernegara.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Arrus Media Grup
- Agung, Ide A.A. Gde. 1989. *Bali Abad XIX*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Alit, D. M. (2014). Samara Pura Berdarah: Reaksi Kerajaan kelungkung terhadap Intervensi belanda 1849-1908. *Social Studies*, 2(2), 1-13.
- Agung, Ide A.A. Gde. 1993. *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Alit, Dewa Made. 2014. *Samara Pura Berdarah: Reaksi Kerajaan Klungkung terhadap Intervensi Belanda 1849-1908*. Bali: Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali
- Bagus Sidemen, Ida dkk. 1983. *Sejarah Klungkung (Dari Smarapura sampai Puputan)*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung
- Bocock, Robert. 2007. *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*. Jelasutra
- Budiasra, Putu dkk. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali*. Jakarta: Proyek Penerbitan dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Depdikbud. 1978. *Sejarah Daerah Bali*. Jakarta
- Hadad, Ismid. 2001. *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- Mahardika, Ketut dkk. *Perang Antara Kerajaan Buleleng dengan Belanda pada Tahun 1846-1849*. Bandar Lampung. FKIP Unila
- Miriam. Budiarto. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noorwatha, Dwi Kadek dkk. 2019. *Naranatha-Kanya Jejak Sejarah Dewa Agung Istri Kanya dan Perkembangan Seni Kerajaan Klungkung abad ke-19*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purnawati Oka, Desak Made. 2012. *Polarisasi Geo Politik Kerajaan di Bali Abad XVI-XX*. Universitas Pendidikan Ganesha: Sejarah Fakultas Ilmu Sosial.
- Raka Putra, Tjokorda. 2015. *Babad Dalem Warih Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan*. Puri Agung Klungkung.
- Sirikan, Ghora. 1956. Gianyar. *Sejarah Bali*. Diketik ulang oleh: Ida I Dewa Gde Catra, Jln. Untung Surapati, Gang Flamboyan no. 2 Amlapura. 30 Maret 2009.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI
- Sumakto, Yogi. *Kebijakan Pertanian Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda di Bali*. Jurnal Hukum Universitas YASRI.
- Wahyudi. 2001. *Teori Konflik dan Penerapannya Pada Ilmu-ilmu Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wirawan, Bagus dkk. 2018. *Ida I Dewa Agung Istri Kanya “Pejuang Wanita Rajawi Melawan Kolonialisme Belanda di Kerajaan Klungkung Abad ke 19”*. Kabupaten Klungkung.